

FLYPAPER EFFECT PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA DAERAH DI KOTA MATARAM

Sofhia Sofhia¹, Victoria K. Priyambodo²

^{1,2}Universitas Mataram, Jl. Majapahit No 62, NTB, Indonesia
Email: priyambodo.victoria@unram.ac.id

Article History

Received: 30-06-2024

Revision: 05-07-2024

Accepted: 07-07-2024

Published: 09-07-2024

Abstract. The regional autonomy system is an effort given to regional governments in the form of authority to manage and administer local affairs in accordance with the needs and characteristics of each region. Sources of regional income can come from, among others, the General Allocation Fund and Original Regional Income. The Flypaper Effect phenomenon can occur when local governments prioritize using transfer funds rather than PAD to meet spending needs. This research is a quantitative descriptive study to look at the Flypaper Effect phenomenon in Mataram City. The results show that Mataram City during the 2018 - 2022 period using Descriptive Statistical Analysis - Crosstab did not experience the Flypaper Effect phenomenon because Regional Original Income (PAD) on Regional Expenditures was greater than the General Allocation Fund (DAU) on Regional Expenditures. The results of this research indicate that the DAU allocation in Mataram City is in accordance with the aim of DAU allocation by the central government, namely encouraging a region to increase its own regional income by optimizing the potential and wealth that exists in that region.

Keywords: Autonomous Regions, Flypaper Effect, General Allocation Fund

Abstrak. Sistem otonomi daerah merupakan upaya yang diberikan kepada pemerintah daerah berupa kewenangan untuk mengelola dan mengurus urusan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Sumber pendapatan daerah dapat berasal dari antara lain Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah. Fenomena *Flypaper Effect* dapat terjadi ketika pemerintah daerah lebih memprioritaskan menggunakan dana transfer daripada PAD untuk memenuhi kebutuhan belanja. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif untuk melihat fenomena *Flypaper Effect* di Kota Mataram. Hasil menunjukkan bahwa Kota Mataram selama periode 2018 – 2022 dengan menggunakan Analisis Statistik Deskriptif – Crosstab tidak mengalami fenomena *Flypaper Effect* karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah lebih besar dibandingkan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi DAU di Kota Mataram telah sesuai dengan tujuan pengalokasian DAU oleh pemerintah pusat yaitu mendorong suatu daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya sendiri dengan mengoptimalkan potensi dan kekayaan yang ada di daerah tersebut.

Kata Kunci: Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, *Flypaper Effect*

How to Cite: Sofhia., & Priyambodo, V. K. (2024). *Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah di Kota Mataram. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4 (3), 839-849. <http://doi.org/10.54373/ifi Jeb.v4i3.1425>

PENDAHULUAN

Indonesia menganut sistem otonomi daerah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang saat ini telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sistem ini merupakan upaya yang diberikan kepada pemerintah daerah berupa kewenangan untuk mengelola dan mengurus urusan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Hak dan wewenang tersebut kemudian diatur dalam APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Managta, 2023). Pemerintah mengharapkan otonomi daerah mampu membiayai belanja daerah secara optimal dan meminimalkan anggaran pemerintah pusat (Kis-Katos & Sjahrir, 2017). Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. Urusan Pemerintahan daerah diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang terdiri atas pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Republik Indonesia, 2017), pendapatan daerah merupakan seluruh hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berjalan. Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Daerah lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah.

Pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Secara khusus, Dana perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. DAU berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah. DAU bertujuan untuk pemerataan keuangan tiap daerah (Allya & Rahmawati, 2023).

Di sisi lain, berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Republik Indonesia, 2017), Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran daerah dan pengeluaran lainnya yang diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi konsumsi, investasi dan pembayaran transfer. Salah satu tujuan utama belanja daerah adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan pelayanan berkualitas tinggi dan dengan demikian dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Wardhani et al., 2017). Belanja pemerintah yang lebih tinggi seharusnya menghasilkan hasil yang lebih baik. Belanja pemerintah dianggap efisien jika dapat memberikan pelayanan yang berkualitas (Wardhani et al., 2017).

Kebijakan penggunaan Pendapatan Asli Daerah diserahkan kepada pemerintah daerah dengan tujuan melaksanakan perintah serta pembangunan dan mengecilkan ketergantungan daerah kepada pusat (Fahriani & Syafrudin, 2022). Setiap daerah pastinya memiliki jumlah penerimaan PAD yang berbeda – beda. Jika suatu daerah memiliki realisasi PAD yang lebih besar dibandingkan dengan daerah lain, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut memiliki industri dan sumber daya ekonomi yang memadai. Sebaliknya, apabila realisasi PAD rendah maka daerah tersebut akan bergantung pada DAU. Kondisi ketergantungan tersebut merupakan fenomena terjadinya *flypaper effect*. Fenomena ini terjadi ketika pemerintah daerah lebih memprioritaskan menggunakan dana transfer daripada PAD untuk memenuhi kebutuhan belanja. Akibatnya, PAD tidak berdampak signifikan terhadap belanja daerah atau dampak transfer dana lebih besar daripada PAD terhadap belanja daerah (Kurniati & Devi, 2022).

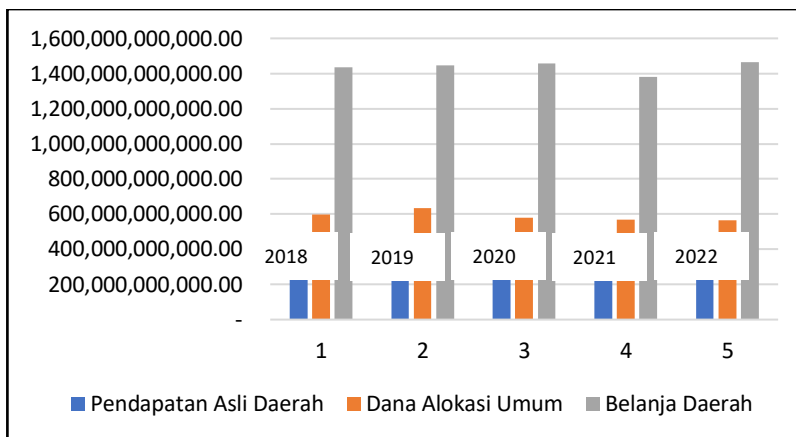
Flypaper effect adalah istilah keuangan publik yang menunjukkan bahwa hibah pemerintah yang diberikan kepada kota-kota penerima meningkatkan tingkat pengeluaran masyarakat lokal lebih dari peningkatan pendapatan daerah dengan jumlah yang setara (Tanjung et al., 2021). Nguyen-Hoang & Yinger (2020) menjelaskan bahwa *flypaper effect* mengacu pada fenomena di mana bantuan antar pemerintah mempunyai dampak yang lebih besar terhadap permintaan layanan publik dibandingkan dengan jumlah pendapatan rumah tangga yang setara. Nguyen-Hoang & Yinger (2020) menjelaskan bahwa *flypaper effect* terjadi jika bantuan antar pemerintah senilai \$1 kepada pemilih mempunyai dampak yang lebih besar terhadap permintaan layanan publik dibandingkan \$1 terhadap pendapatan rumah tangga. Hibah antar pemerintah menurunkan biaya marginal pelayanan publik dibandingkan tingkat layanan sebelum hibah dan oleh karena itu memberikan insentif harga, yang tidak timbul seiring dengan peningkatan pendapatan, untuk penyediaan layanan pemerintah.

Dahlby (2011) memberikan contoh model Cobb-Douglas yang mengarah pada efek flypaper. Model ini mengasumsikan bahwa (1) pemilih memilih barang-barang swasta tetapi pemerintah secara independen memilih tingkat barang kena pajak dan (2) setiap pemilih berpikir orang lain akan bertindak sama seperti yang dilakukannya sehingga tingkat barang kena pajak yang dipilihnya dapat diperlakukan sebagai tingkat barang kena pajak yang dipilihnya sebagai dasar pengenaan pajak.

Sidhi & Dewi (2023) dalam penelitiannya yang meneliti di Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Bali dan Jawa memperoleh hasil bahwa telah terjadi *Flypaper Effect* karena koefisien yang dimiliki PAD (0,075) lebih rendah dibandingkan dengan DAU (0,796). Penelitian serupa juga dilakukan oleh Rahmatillah et al., (2023) yang meneliti di Provinsi Aceh, Muthia (2023) yang meneliti di Provinsi Sulawesi Tengah, dan Awalia et al., (2023) yang meneliti di Kabupaten Kuningan memperoleh hasil bahwa DAU lebih besar dibandingkan PAD yang mengakibatkan terjadinya fenomena *Flypaper Effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana perimbangan yaitu DAU untuk membiayai belanja langsung dan tidak langsung daerah tersebut.

Namun, beberapa peneliti menyatakan hasil sebaliknya. Kusyala & Badrudin (2023) yang melakukan penelitian di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat memperoleh hasil bahwa tidak terdapat *Flypaper Effect* karena hasil uji menunjukkan bahwa PAD memiliki nilai koefisien (0,607) yang lebih besar dibandingkan dengan DAU yang memiliki nilai koefisien (0,371). Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rizqullah & Meldona (2023) yang meneliti di Kota Bima memperoleh hasil bahwa tidak terdapat *Flypaper Effect* pada Kota Bima. Hasil uji menunjukkan bahwa koefisien DAU sebesar 0,22 sedangkan koefisien PAD sebesar 0,25 yang artinya proksi DAU lebih kecil dibandingkan dengan proksi PAD. Selanjutnya, Kurniati & Devi (2022) juga melakukan penelitian mengenai *Flypaper Effect* di seluruh Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Lampung memperoleh hasil bahwa tidak terjadi *Flypaper Effect* karena pemerintah daerah lebih banyak menggunakan PAD dibandingkan DAU untuk belanja daerah.

Kota Mataram merupakan salah satu kota yang berada di tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki potensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi karena letaknya yang sangat strategis. Namun, pertumbuhan ekonomi Kota Mataram sempat mengalami penurunan dari 8,01% di tahun 2018 menjadi 4,98% di tahun 2019 (Nirkomala, 2020). Penurunan ini terjadi karena adanya bencana gempa bumi di bulan Agustus 2018. Berikut grafik PAD, DAU, dan Belanja Daerah di Kota Mataram tahun 2018 – 2022.



Gambar 1. Jumlah PAD, DAU, dan belanja daerah di kota Mataram Tahun 2018-2022

Berdasarkan Gambar 1, jumlah PAD dan DAU di Kota Mataram dari tahun 2018 sampai 2022 jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah Belanja Daerah. Meskipun lebih rendah, di tahun 2019 – 2022 selisih antara pendapatan dan belanja selalu surplus. Hanya di tahun 2018 saja yang mengalami defisit karena adanya bencana gempa bumi, sehingga pemerintah daerah lebih memprioritaskan anggaran pada penanganan dan bantuan akibat bencana alam.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan dari penulisan esai ini ialah untuk mengetahui apakah terjadi *Flypaper Effect* terhadap belanja daerah Kota Mataram di tahun 2018 – 2022. Data jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun 2018-2022 diperoleh melalui Laporan Realisasi Anggaran yang berada di website (mataramkota.go.id).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Lingkup penelitian yang digunakan yaitu data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Daerah di Kota Mataram dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Teknis analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis proporsi dan analisis *crosstab Chi-Square Test*. Teknik analisis proporsi digunakan untuk menilai kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah (Adiputra, 2014). Analisis Proporsi memiliki formulasi sebagai berikut :

$$p \text{ (kontribusi)} = \frac{X_i}{X} \times 100\%$$

Keterangan:
 Xi = PAD dan DAU
 X = Belanja Daerah

Teknis kedua yaitu Analisis Crosstab yang merupakan analisis yang menampilkan tabulasi silang (table kontingensi) yang menunjukkan suatu distribusi bersama, deskripsi statistik bivariat dan pengujian terhadap 2 variabel atau lebih, terutama sekali variabel dalam bentuk kategori (Sunarto, 2017). Proses asosiatif digunakan untuk menghitung pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja daerah. Oleh karena itu, hasilnya menentukan terjadinya Efek *flypaper*.

HASIL

Teknik Analisis Proporsi

Hasil analisis proporsi PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah Kota Mataram adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Kontribusi PAD dan DAU terhadap belanja daerah kota Mataram Tahun 2018-2022

Tahun	PAD dan DAU	Belanja Daerah	Kontribusi
2018	Rp 957.144.079.208	Rp 1.434.640.291.212	67%
2019	Rp 1.008.327.656.339	Rp 1.446.975.861.771	70%
2020	Rp 942.394.086.011	Rp 1.457.702.553.197	65%
2021	Rp 962.298.379.241	Rp 1.382.352.867.747	70%
2022	Rp 1.012.227.740.913	Rp 1.464.164.668.856	69%

Dari hasil analisis proporsi, rata-rata kontribusi PAD dan DAU terhadap belanja daerah Kota Mataram selama tahun 2018-2022 adalah 68%. Untuk dapat dikatakan berkontribusi terhadap belanja daerah, persentase kontribusi setiap tahunnya harus melebihi persentase rata-rata kontribusi selama 5 tahun. Pada tahun 2018 dan 2020, PAD dan DAU tidak berkontribusi terhadap belanja daerah dengan nilai persentase masing-masing sebesar 67% dan 65%. Sedangkan di tahun 2019, 2021, dan 2022, hasil analisis proporsi menunjukkan bahwa PAD dan DAU berkontribusi terhadap belanja daerah dengan nilai persentase kontribusi diatas 68%. Rendahnya nilai persentase kontribusi di tahun 2018 dan 2020 disebabkan oleh rendahnya penerimaan PAD dengan jumlah masing-masing sebesar Rp. 358.825.822.208,3 dan Rp. 363.165.361.010,39. Sehingga, untuk meningkatkan PAD di masa mendatang, pemerintah daerah harus meningkatkan kinerja dalam mengelola sumber daya, termasuk sumber daya penerimaan daerah dan sumber daya manusia.

Analisis Crosstab

Analisis pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah, penulis menggunakan Analisis *Crosstab Chi-Square*. *Chi-Square Test* adalah teknik analisis untuk melihat hubungan antara variabel data nominal dengan ketentuan jika *Asymp. Sig (2-sided) Linear-by-Linear*

$Association > \alpha (0,05)$ maka H_0 diterima atau tidak terjadi *flypaper effect* dan jika $Asymp. Sig (2-sided) Linear-by-Linear Association < \alpha (0,05)$ maka H_0 ditolak atau terjadi *flypaper effect* (Wijayanti, 2023).

Tabel 2. Analisis crosstab PAD terhadap belanja daerah di kota Mataram

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	20,000 ^a	16	,220
Likelihood Ratio	16,094	16	,446
Linear-by-Linear Association	,104	1	,747
N of Valid Cases	5		

a. 25 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,20.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah memperoleh Value Linear-by-Linear Association 0,104 dengan nilai $Asymp. Sig (2-sided) 0,747 > \alpha (0,05)$.

Tabel 3. Analisis Crosstab DAU terhadap Belanja Daerah di Kota Mataram

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	20,000 ^a	16	,220
Likelihood Ratio	16,094	16	,446
Linear-by-Linear Association	,127	1	,721
N of Valid Cases	5		

a. 25 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,20.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah memperoleh Value Linear-by-Linear Association 0,127 dengan nilai $Asymp. Sig (2-sided) 0,721 > \alpha (0,05)$. Berdasarkan tabel 2 dan tabel 3, diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan nilai $Asymp. Sig (2-sided) 0,747$ berpengaruh lebih besar daripada Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai $Asymp. Sig (2-sided) 0,721$.

DISKUSI

Allers & Vermeulen (2016) menjelaskan bahwa Pemerintah daerah cenderung menggunakan dana hibah dari pemerintah pusat untuk meningkatkan tingkat belanja. *Flypaper Effect* ini, yaitu uang melekat pada tempatnya, disebut sebagai sebuah anomali, karena kecenderungan untuk membelanjakan pendapatan swasta untuk layanan publik jauh lebih rendah (Allers & Vermeulen, 2016). Becker et al., (2020) mempertimbangkan potensi *flypaper*

effect dalam situasi redistribusi kolektif. Redistribusi atau distribusi pendapatan yang adil adalah salah satu barang publik terpenting dalam masyarakat modern.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Malik & Inuzula (2021) menunjukkan hasil bahwa terjadi fenomena *flypaper effect* di Kabupaten Bireuen dimana teknik analisis data yang digunakan ialah uji statistik deskriptif, uji hipotesis, dan model regresi linier berganda. Fenomena tersebut terjadi karena Kabupaten Bireuen masih bergantung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Temuan serupa juga dilakukan oleh Farica & Wijaya (2023) yang meneliti di seluruh Kabupaten/Kota DIY Yogyakarta dimana teknik analisis data yang digunakan ialah *Descriptive Statistical Analysis, Regression Model Selection (Chow Test and Test The Langrange Multiplier), Classic Assumption Test*, dan *Robust Standard Error Regression*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi fenomena *Flypaper Effect* di Provinsi DIY Yogyakarta karena besarnya koefisien regresi DAU sebesar 1,26627 lebih besar dibandingkan dengan koefisien regresi yang dimiliki PAD yaitu sebesar 1,030872.

Dalam penelitian ini, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Kota Mataram selama periode 2018-2022 dengan menggunakan Analisis Statistik Deskriptif-Crosstab tidak mengalami fenomena *flypaper effect* karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah lebih besar dibandingkan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji analisis crosstab yang berada pada tabel 2 dan tabel 3 yakni nilai Linear-by-Linear Association Pendapatan Asli Daerah (PAD) $0,747 > \alpha (0,05)$ dan nilai Linear-by-Linear Association Dana Alokasi Umum (DAU) $0,721 > \alpha (0,05)$. Fenomena *Flypaper* itu sendiri akan terjadi apabila penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi DAU di Kota Mataram telah sesuai dengan tujuan pengalokasian DAU oleh pemerintah pusat yaitu mendorong suatu daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya sendiri dengan mengoptimalkan potensi dan kekayaan yang ada di daerah tersebut. *flypaper effect* sulit diselaraskan dengan model standar pembuatan kebijakan (Becker et al., 2020). Berdasarkan model-model ini, kebijakan yang optimal diharapkan mampu menyamakan utilitas marginal sosial dana publik dan dana swasta (Becker et al., 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, didapatkan kesimpulan bahwa pada rata-rata kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum di Kota Mataram selama tahun 2018-2022 sebesar 68%. Di tahun 2018 dan 2020, PAD dan DAU tidak

berkontribusi terhadap belanja daerah karena nilai persentase kontribusi berada di bawah rata-rata. Sedangkan di tahun 2019, 2021, dan 2022, PAD dan DAU berkontribusi terhadap belanja daerah dengan nilai kontribusi tertinggi sebesar 70% di tahun 2019 dan 2021. Selama tahun 2018-2022, Kota Mataram tidak mengalami fenomena *flypaper effect* karena respons penggunaan PAD lebih besar dibandingkan dengan DAU. Walaupun, pada tahun 2019 jumlah DAU lebih tinggi dibandingkan dengan tahun yang lainnya karena pemerintah memprioritaskan anggaran pada penanganan bantuan bencana alam dan di tahun 2020 jumlah PAD lebih rendah dibandingkan dengan tahun yang lainnya karena dampak dari pandemi Covid-19, pemerintah Kota Mataram tetap mengoptimalkan penggunaan dana dari PAD dibandingkan dana dari pemerintah pusat yaitu DAU. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa alokasi Dana Alokasi Umum di Kota Mataram sesuai dengan tujuan alokasi yang disyaratkan pemerintah pusat yaitu untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya sendiri. Saran yang diberikan penulis kepada pemerintah daerah ialah untuk meningkatkan penerimaan PAD mengingat Kota Mataram memiliki banyak potensi di bidang pariwisata, akomodasi, usaha perdagangan (UMKM), industri, dan masih banyak lagi.

REKOMENDASI

Penelitian berikutnya dapat menggunakan Regresi Data Panel untuk menguji *flypaper effect* di lintas daerah dan lintas waktu. Diperolehnya kondisi *flypaper effect* di Daerah Otonomi Baru bermanfaat untuk berbagai keperluan, termasuk mengkaji kemandirian Daerah Otonomi Baru. Singkatnya, Panel Regresi Data dinilai tepat untuk memastikan *Flypaper Effect* di Daerah Otonomi Baru (Tanjung et al., 2021). Rekomendasi yang diberikan penulis kepada pemerintah daerah yaitu perlunya mempertimbangkan adanya *flypaper effect* dalam bantuan program pemerintah dan belanja daerah. Setelah *flypaper effect* diperhitungkan, misalnya, Rp10.000 dari bantuan negara menghasilkan peningkatan belanja pendidikan sebesar Rp1.500 dan keringanan pajak properti sebesar Rp8.500 (Nguyen-Hoang & Yinger, 2020). *Flypaper effect* penting karena menunjukkan bagaimana pemilih cenderung menanggapi perubahan bantuan yang diterima daerah mereka dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (Nguyen-Hoang & Yinger, 2020). Para pembuat kebijakan yang peduli dengan dampak program bantuan mereka terhadap pemerintah penerima bantuan harus menyadari adanya *flypaper effect*.

REFERENSI

- Adiputra, I. M. P. (2014). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika (JINAH)*, 3(2), 1232–1261.
- Allers, M. A., & Vermeulen, W. (2016). Capitalization of equalizing grants and the flypaper effect. *Regional Science and Urban Economics*, 58, 115–129. <https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2016.03.005>
- Allya, H. R., & Rahmawati, F. (2023). Flypaper Effect Pada Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(1), 235. <https://doi.org/10.35906/jep.v9i1.1493>
- Awalia, N. P., Arifin, A., Alfariy, M. F., & Yaramai, J. Y. (2023). Flypaper Effect Analysis of General Allocation Fund and Local Own-Source Revenue on Expenditures in Kuningan Regency 2006-2020. *EKO-REGIONAL: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 18(1), 99–109. <https://doi.org/10.32424/1.erjpe.2023.18.1.3341>
- Becker, J., Hopp, D., & Kriebel, M. (2020). Mental accounting of public funds – The flypaper effect in the lab. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 176, 321–336. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2020.04.026>
- Dahlby, B. (2011). The marginal cost of public funds and the flypaper effect. *International Tax and Public Finance*, 18(3), 304–321. <https://doi.org/10.1007/s10797-010-9160-x>
- Fahriani, F., & Syafrudin, R. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Serta Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(1), 42–52.
- Farica, W., & Wijaya, R. S. (2023). The Flypaper Effect Phenomena in Regional Expenditure in Districts/Cities of the Special Province of Yogyakarta. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 3(4), 1347–1362. <https://doi.org/10.55927/ijba.v3i4.5154>
- Kis-Katos, K., & Sjahrir, B. S. (2017). The impact of fiscal and political decentralization on local public investment in Indonesia. *Journal of Comparative Economics*, 45(2), 344–365. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2017.03.003>
- Kurniati, H., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 dalam Perspektif Ekonomi Islam. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 7(2), 187–208. <https://doi.org/10.30736/jes.v7i2.365>
- Kusyala, N. A. K., & Badrudin, R. (2023). Pengaruh Flypaper Effect terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 14–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.53916/jeb.v17i1.31>
- Malik, I., & Inuzula, L. (2021). Flypaper Effect Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten Bireuen. *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 4(2), 202. <https://doi.org/10.29103/njiab.v4i2.6275>
- Managta, H. H. (2023). Analisis Flypaper Effect Belanja Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 3(11), 1187–1196. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i11.1070>
- Muthia, M. (2023). Fenomena Flypaper Effect Dari Unconditional Grant Di Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Ilmiah MEA*, 7(2), 1474–1490.
- Nguyen-Hoang, P., & Yinger, J. (2020). The Flypaper Effect: Methods, Magnitudes, and Mechanisms. *Journal of Education Finance*, 46(2), 158–188. <https://www.researchgate.net/publication/344658691>
- Nirkomala, N. (2020). *Pertumbuhan Ekonomi Mataram Turun Pada 2019*. ANTARA NTB. <https://mataram.antaranews.com/berita/98391/pertumbuhan-ekonomi-mataram-turun-pada-2019>

- Rahmatillah, Marzuki, Ghazali Syamni, & Nurlela. (2023). Analysis Of the Flypaper Effect and Its Influence on District/City Regional Expenditures in Aceh Province 2016-2021. *Journal of Accounting Research, Utility Finance and Digital Assets*, 1(3), 244–253. <https://doi.org/10.54443/jaruda.v1i3.45>
- Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Rizqullah, A., & Meldona, M. (2023). Analisis Flypaper Effect dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Mediasi Belanja Daerah. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 832–842. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.2692>
- Sidhi, P. D. I., & Dewi, N. A. W. T. (2023). Pengaruh Flypaper Effect terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Bali dan Jawa Tahun 2019-2021. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 33–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/vjra.v12i2.61130>
- Sunarto, dan R. (2017). Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis. *Cetakan Ke-4 Bandung: Alfabeta*, 80.
- Tanjung, A. H., Salam, S., Rusdi, J. F., Ermawati, Y., Novianty, I., Hendaris, R. B., & Apriliawati, Y. (2021). Flypaper effect assessment methods in the expansion of regional autonomy. *MethodsX*, 8. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2021.101387>
- Wardhani, R., Rossieta, H., & Martani, D. (2017). Good governance and the impact of government spending on performance of local government in Indonesia. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 3(1), 77–102. <https://doi.org/10.1504/IJPSPM.2017.082503>
- Wijayanti, R. (2023). Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek. *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 11(2), 50–62.